



LAPORAN KINERJA

KANWIL DJKN
KALIMANTAN BARAT
TA.2021

LAPORAN KINERJA

KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT

TA. 2021



NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

1. INTEGRITAS

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral

2. PROFESIONALISME

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparanm cepat, akurat dan aman.

3. SINERGI

Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

4. PELAYANAN

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

5. KESEMPURNAAN

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

- i Halaman Judul
- ii Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
- iii Daftar Isi
- iv Daftar Tabel
- v Daftar Gambar
- vi Pengantar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat
- vii Ringkasan Eksekutif

BAB I

PENDAHULUAN

- 1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 8 Peran Strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat
- 10 Sistematika Laporan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 12 Penetapan Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- 18 Capaian Kinerja Organisasi
- 32 Realisasi Anggaran
- 33 Achievement Kanwil DJKN Kalbar

BAB IV

PENUTUP

DAFTAR TABEL

SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 1.1	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN
Tabel 1.2	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN
Tabel 1.3	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL SINGKAWANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN
Tabel 1.4	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN
Tabel 1.5	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL PONTIANAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN
Tabel 1.6	KOMPOSISI PEGAWAI PADA KPKNL SINGKAWANG BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN PENDIDIKAN

PETA STRATEGI

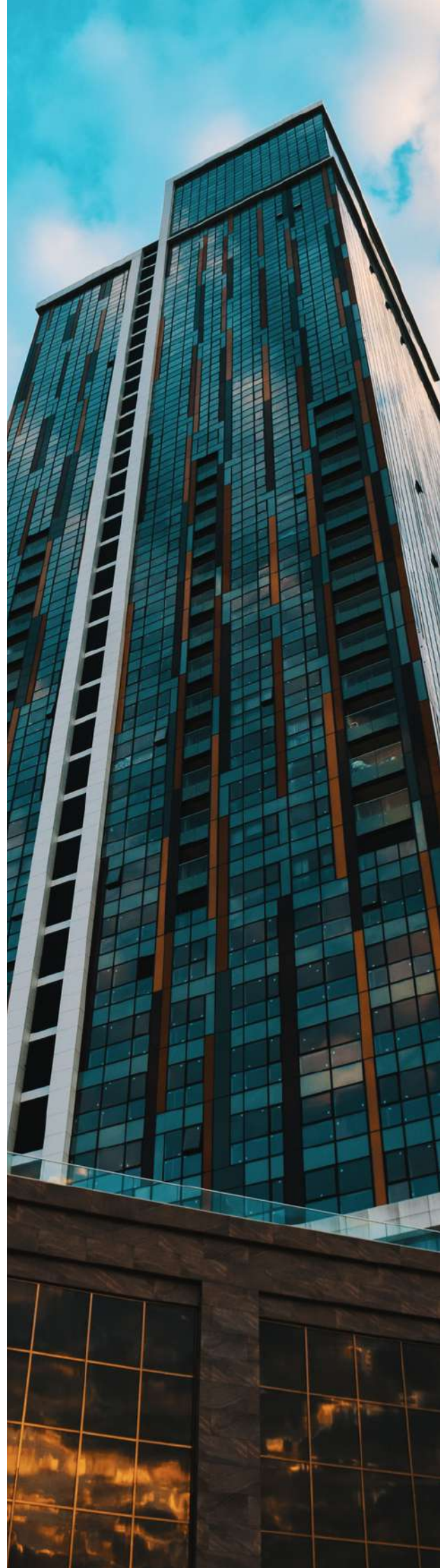
Tabel 2.1	SASARAN STRATEGIS DAN URAIAN IKU
-----------	----------------------------------

ANGGARAN

Tabel 2.2	RINCIAN ANGGARAN KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
-----------	--

CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.1	PERSPEKTIF CAPAIAN KINERJA
Tabel 3.2	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI IKU DAN INDEKS TANPA BATAS
Tabel 3.3	NILAI NKO PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 SAMPAI DENGAN 2021
Tabel 3.4	PERKEMBANGAN NKO PADA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 S.D. 2021



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
Gambar 1.2	WILAYAH KERJA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
Gambar 1.3	STRUKTUR ORGANISASI KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT
Gambar 1.4	KEPALA KANTOR DJKN KALBAR BESERTA PARA PEJABAT ESELON III
Gambar 1.5	TABEL KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Gambar 1.6	KOMPOSISI PEGAWAI KESELURUHAN BERDASARKAN GOLONGAN PENDIDIKAN
Gambar 2.1	IKHTISAR SASARAN STRATEGIS
Gambar 3.1	PERKEMBANGAN NKO KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT



PENGANTAR

KEPALA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT



".... Semangat untuk selalu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2021 dibuktikan dengan Capaian Nilai Organisasi Kanwil DJKN Kalbar sebesar 111,76% di tengah Pandemi Covid-19, meraih berbagai prestasi dan pengembangan inovasi yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat.."

111,76%

NILAI KINERJA ORGANISASI

Tahun 2021 masih diwarnai dengan Pandemi virus Covid-19 yang tidak hanya membahayakan bagi kesehatan namun juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan antara lain ekonomi, sosial, dan kejiwaan/psikologi.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat menghadapi tantangan yang sama. Pandemi ini telah menguji *resiliensi* kami, dimana kami dituntut untuk mampu keluar dari kondisi ini dengan memiliki kemampuan beradaptasi secara positif dan tetap teguh dalam menghadapi situasi sulit ini. Dengan kemampuan beradaptasi ini, kami lebih tenang dan menghindari kepanikan serta menumbuhkan keyakinan untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19.

Kami senantiasa berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pandemi ini berpengaruh terhadap mentalitas pegawai untuk menghadapinya. Kami meningkatkan kebersamaan dan kepedulian diantara pegawai dan tetap fokus untuk menyelesaikan tugas sesuai target yang telah ditentukan.

Membangun pikiran positif ditengah pandemi Covid-19 dan untuk mampu mengatasi masa-masa sulit tahun 2021 sebagaimana tahun sebelumnya. Dengan

sikap positif tersebut maka seluruh pegawai akan memandang pandemi ini menjadi pemantik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Kepedulian dan semangat pegawai memunculkan antusiasme untuk bersama menghasilkan kinerja terbaik dalam setiap pekerjaannya

Dalam memberikan pelayanan terbaik, Kanwil DJKN Kalimantan melakukan inovasi-inovasi antara lain pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Manajemen Aset Negara (SIMPELMAN) bekerjasama dengan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Kinerja (SIMONA), dan E-Area Pelayanan Terpadu. Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan inovasi percepatan SOP layanan dan aktif menyampaikan publikasi melalui media elektronik yaitu TVRI dan RRI Kalimantan Barat, media cetak lokal harian Pontianak Post, media sosial, dan website. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi objektif kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman yang lebih baik akan upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik dan isu-isu lainnya

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat tertuang dalam Laporan Kinerja yang didalamnya menguraikan

rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan LKj Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor 109/KN.1/2021 tanggal 10 Januari 2021 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021.

Selama tahun 2021, Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah melaksanakan berbagai program kerja dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja terdiri dari 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Kalimantan Barat tahun 2021 mencapai 111,76%. Hal ini merupakan keberhasilan bersama seluruh pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat, kerjasama dan sinergi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Dalam LKj akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian

IKU tahun 2021 dengan Kontrak Kinerja tahun 2021, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan sebagai acuan kami dalam memfokuskan kemampuan terbaik untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu, dalam LKj ini diuraikan hal yang mendukung pencapaian target, kendala dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dimaksud.

Pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 terdiri dari 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning yaitu Presentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dengan NKO sebesar 84,31% dan Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan NKO sebesar 95,05%.

Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif di tengah wabah pandemi Covid-19, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Dengan membawa semangat nilai-nilai organisasi yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan kita bersama dan dapat melayani dengan lebih baik serta memberikan kontribusi nyata untuk

membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Semangat serta kinerja terbaik yang dilakukan oleh segenap jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat di tahun 2021 juga dibuktikan dengan meningkatnya NKO Tahun 2021 sebesar 2,47% dengan capaian NKO Tahun 2020 sebesar 109,29%.

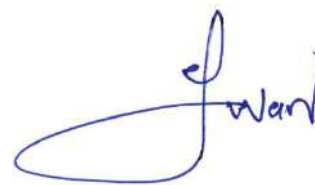
Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengapresiasi atas kerjasama dan sinergi seluruh pihak dan seluruh masyarakat yang kerap bersentuhan dengan layanan kami. Kanwil DJKN Kalimantan Barat berharap agar kerjasama dan sinergi yang selama ini telah berjalan dapat dilanjutkan serta berjalan lebih baik lagi guna mendukung upaya mewujudkan

Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Selaras dengan komitmen kami untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan tuntas serta *mind set* yang sama bagi pejabat dan pegawai dengan motto kami SEMPURNA (semangat, proaktif, tulus, ramah dan amanah) dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang diemban. Semoga Kanwil DJKN Kalimantan Barat menjadi instansi vertikal DJKN yang lebih baik dan memberikan kontribusi terbaik untuk Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Edward UP Nainggolan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang di dalamnya diuraikan secara ringkas rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Laporan kinerja disusun dengan menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2021.

Dalam menunjang tercapainya tujuan strategis tersebut, maka telah disusun Peta Strategi DJKN tahun 2021 berdasarkan metodologi Balanced Scorecard (BSC) dimana konsep ini menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya.

Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudiandikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Peta strategi Kemenkeu Two DJKN tahun 2021 mempunyai 3 perspektif yang saling

berhubungan, yaitu: Strategic Outcome (Stakeholders Perspective), Strategic Driver (Internal Process Perspective), dan Learning and Growth Perspective.

Perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 10 sasaran strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2021 telah sesuai dengan target yang dengan ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,76%. Pencapaian IKU Kanwil DJKN Kalimantan Barat terdiri dari 19 IKU dengan 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning yaitu Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan lelang (PNBP) dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Capaian IKU tahun 2021 yang dijabarkan pada tabel berikut ini:

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal			
1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%	120%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	84,31%
1c-CP	Presentase Penurunan nilai Outstanding Putang Negara (saldo PNDS s.d. 2017)	100%	104,51%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-N	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	83,67	98,93
2b-CP	Persentase Realisasasi Pokok Lelang	100%	120%
Birokrasi dan Layanan Public Yang Agile, Efektif, dan Efisien			
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,29	4,92
Penetapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif			
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	106,85%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%	32%
Penetapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif			
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	120%
5b-CP	Presentase produktivitas lelang	35%	39,74%
5c-CP	Presentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	92%	108,70%

5d-CP	Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	12,5%	25%
Edukasi yang efektif			
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89	99,65
Pengawasan dan pengendalian yang efektif			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	91,65%
SDM yang kompeten			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%
Organisasi yang fit-for-purpose			
9a-N	Nilai Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85	97,65
9b-N	Nilai hasil revidi pengelolaan kinerja	75	91,65
Pengelolaan Keuangan yang optimal			
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,05%

Pada tahun 2021, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dihadapkan dalam kondisi yang *extraordinary* di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut kepedulian dan kesadaran seluruh elemen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan, tetapi juga memberikan

dampak pada sektor ekonomi, sosial dan keuangan Kanwil DJKN Kalimantan Barat berupaya beradaptasi dengan perubahan agar Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat mencapai target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*.

Pelayanan Kanwil DJKN Kalimantan Barat tetap berjalan dengan baik dan lebih menekankan pelaksanaan tugas dengan teknologi informasi. Selain itu, pelaksanaan tugas dilakukan secara

selektif dengan penugasan *Work From Home* (WFH) dan *Work From Homebase* (WFHB).

Kondisi tersebut tidak menurunkan semangat dan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada *stakeholders* dengan melakukan inovasi dan perbaikan secara terus menerus.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai inovasi yang telah dikembangkan antara lain pengembangan aplikasi SIMPELMAN, SIMONA, aplikasi google calender, spreadsheets weekly meeting dan E-Area Pelayanan Terpadu, serta SOP percepatan layanan, penyusunan SOP integrasi layanan, perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjungpura, publikasi dan pelayanan secara proaktif serta solutif. Keberhasilan Kanwil DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2021 juga ditunjukkan dengan beberapa penghargaan yang diperoleh antara lain :

1. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2020.
2. Juara Harapan 1 lomba Kompetisi Inovasi Asset Manager (KOIN) DJKN Tahun 2021 Kategori Optimalisasi Aset pada Pengguna Barang.
3. Juara Harapan 1 lomba Kompetisi Inovasi Asset Manager (KOIN) DJKN

Tahun 2021 Kategori Optimalisasi Aset pada Pengelola Barang.

4. Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Satker SAKTI Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.
5. Aplikasi SIMPELMAN terpilih dalam Top 10 Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2021.

Prestasi lainnya yaitu :

1. Penghargaan Terbaik II Konsistensi Mempertahankan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam masa Pandemi Covid Semester I Tahun 2020 (Pagu 3 Miliar s.d. 13 Miliar)
2. Peringkat Ketiga (Katagori Pagu di atas 1 Miliar s.d. 5 Miliar) sebagai satker Berkinerja Terbaik dalam Implementasi IKPA Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat TA 2020 dengan nilai 100.
3. Edward UP Nainggolan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan ZI-WBK di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020;
4. Nominasi (30 Besar) Anugerah ASN Tahun 2020 Katagori PPT Teladan atas nama Edward UP Nainggolan (Kepala Kanwil DJKN Kalbar);
5. Pegawai Inspiratif pada masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 atas nama Iwan Darma Setiawan (Kepala Seksi Bimbingan Lelang I.

6. Juara II Lomba Menulis Artikel dalam Rangka Peringatan HUT ke-14 DJKN Tahun 2020 atas nama Agus Budianta (Kepala Seksi Hukum).
7. Terpilih dalam dua belas besar pegawai Berprestasi Kementerian Keuangan Tahun 2021 a.n Badrud Duja.



BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berpedoman pada Pasal 1237 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan

Gambar 1.1 Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat merupakan unit eselon II selaku instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Sutoyo No. 122 Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01./2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (Kanwil DJKN Kalimantan Barat) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu KPKNL Pontianak, dan KPKNL Singkawang. KPKNL Pontianak berkedudukan di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Letnan Jenderal

Sutoyo Nomor 19 Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. KPKNL Singkawang berkedudukan di Jalan Aliyong Nomor 1, Kota Singkawang.

Gambar 1.2 Wilayah Kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Adapun wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara meliputi 14 (empat belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu:

Kota /Kabupaten yang berada di wilayah kerja
KPKNL Pontianak

1. Kota Pontianak
2. Kabupaten Kubu Raya
3. Kabupaten Ketapang
4. Kabupaten Kayong Utara
5. Kabupaten Sanggau
6. Kabupaten Sekadau
7. Kabupaten Sintang
8. Kabupaten Melawi
9. Kabupaten Kapuas Hulu

Kota/Kabupaten yang berada di wilayah kerja KPKNL Singkawang

1. Kota Singkawang
2. Kabupaten Sambas
3. Kabupaten Bengkayang
4. Kabupaten Mempawah
5. Kabupaten Landak

Sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan industri pengolahan menjadi sektor penting yang menggerakkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat dengan luas wilayah kurang lebih 147.557 Km². Perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup berarti. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, masyarakat semakin kritis dan mengharap adanya peningkatan pula terhadap kualitas layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam menyikapi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang tersebut, jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan selalu berlandaskan visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

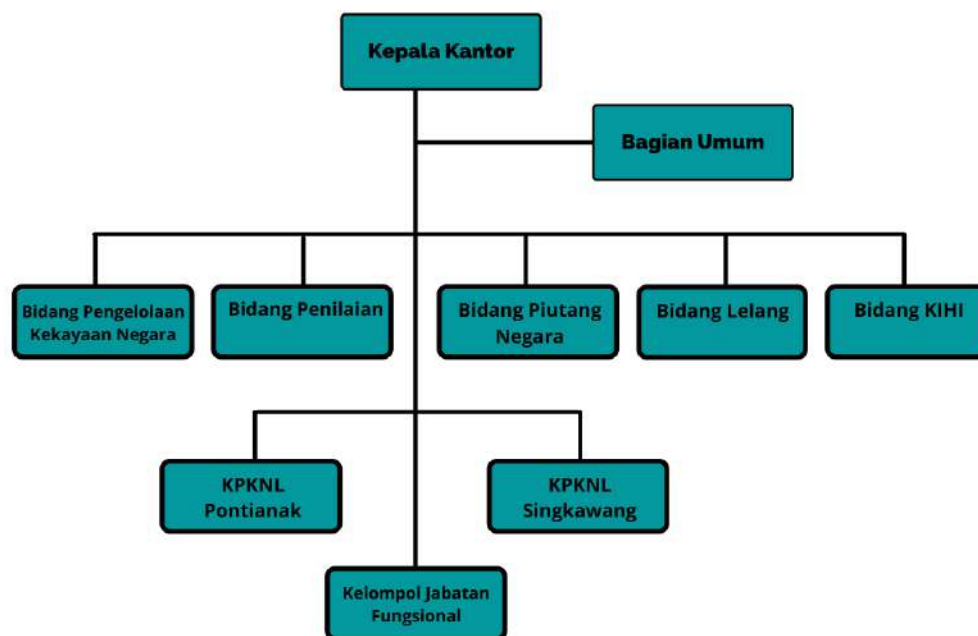
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat yang mempunyai peran koordinasi, bimbingan

teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang pada pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL di wilayah kerjanya, menjalankan fungsi, antara lain:

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penilaian;
- c. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengurusan piutang negara;
- d. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara;
- e. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;

- f. Pemberian bimbingan teknis penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- g. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Pembinaan terhadap penilai, usaha jasa lelang dan profesi pejabat lelang;
- j. Pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat



Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01./2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur

organisasi 1 (satu) Kepala Kantor, 1 (satu) bagian umum, 5 (lima) bidang, dan kelompok jabatan fungsional. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat saat ini didukung oleh 2 (dua) kantor vertikal yaitu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang.

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Kantor Edward UP Nainggolan dibantu oleh Kepala Bagian Umum Fatchur Berlianto, Kepala Bidang KIH Kristijanindyati Puspitasari, Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Darnadi, Kepala Bidang Penilaian Titik Wijayanti, Plt. Kepala Bidang Piutang Negara Darnadi, dan Kepala Bidang Lelang Andri Dwinanto.

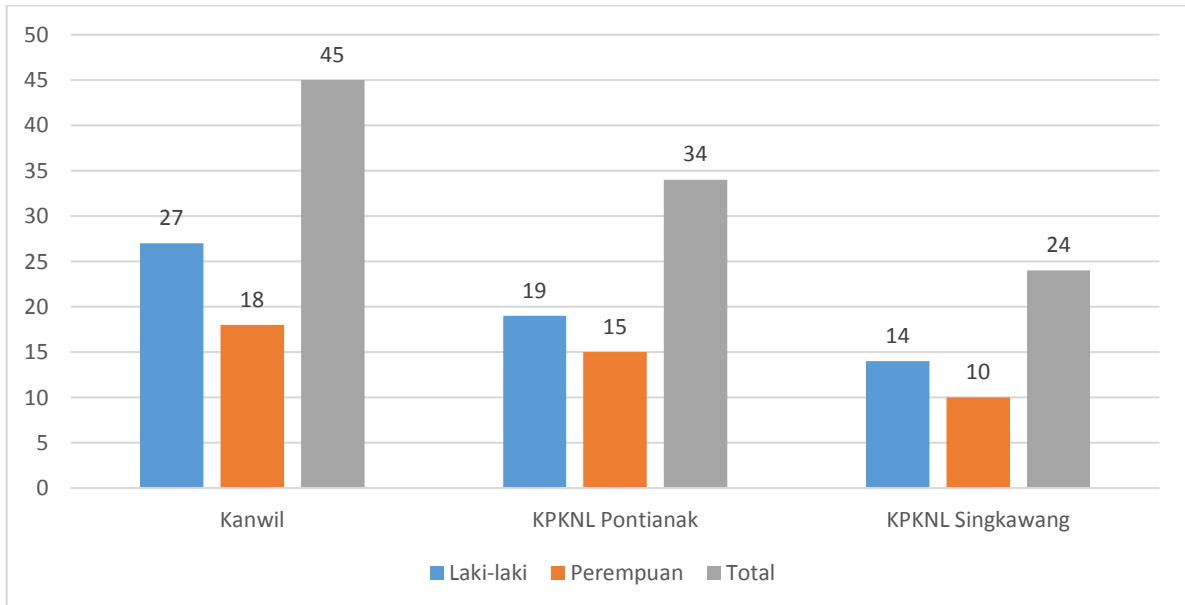
Gambar 1.4 Gambar Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta Para Pejabat Eselon III



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat didukung oleh 104 sumber daya manusia (SDM) dari berbagai bidang ilmu dan keahlian seperti ekonomi, keuangan, manajemen, hukum, komunikasi, teknik, administrasi, sosial, dan lainnya. Komposisi pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat

terbagi di unit Kanwil sebanyak 45 orang, KPKNL Pontianak sebanyak 34 orang, KPKNL Singkawang sebanyak 24 orang. Berdasarkan data jumlah pegawai dapat digambarkan data komposisi pegawai pada masing-masing kantor berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Gambar 1.5 Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN GOLONGAN

1. Unit Kerja : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	3	18	6	27
Perempuan	0	6	10	3	18
Jumlah	0	9	28	9	45

2. Unit Kerja : KPKNL Pontianak

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	5	11	3	19
Perempuan	0	7	7	1	15
Jumlah	0	12	18	4	34

3. Unit Kerja : KPKNL Singkawang

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai pada KPKNL Singkawang berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
Laki-laki	0	6	7	1	14
Prempuan	0	5	5	0	10
Jumlah	0	11	12	1	24

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN

1. Unit Kerja : Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	3	4	7
D1	1	2	3
D3	3	4	7
D4/S1	13	6	19
S2	7	1	8
S3	0	1	1
Jumlah	27	18	45

2. Unit Kerja : KPKNL Pontianak

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai pada KPKNL Pontianak berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

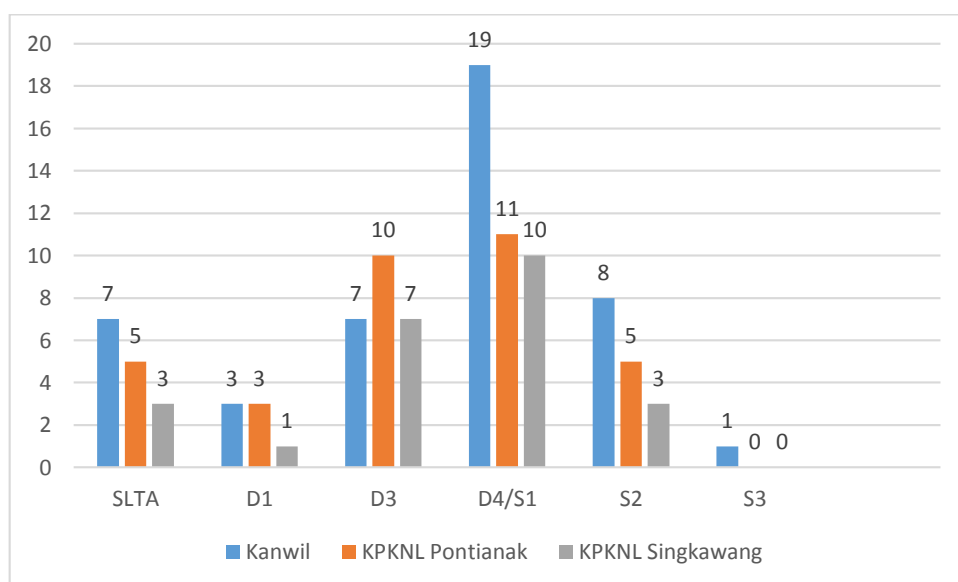
Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	4	1	5
D1	1	2	3
D3	5	5	10
D4/S1	5	6	11
S2	4	1	5
Jumlah	19	15	34

3. Unit Kerja : KPKNL Singkawang

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai pada KPKNL Singkawang berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	3	0	3
D1	0	1	1
D3	3	4	7
D4/S1	7	3	10
S2	1	2	3
Jumlah	14	10	24

Gambar 1.6 Komposisi Pegawai Keseluruhan berdasarkan Golongan Pendidikan



Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terus berkomitmen mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat/ *course/ workshop/ e-learning* atau mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan strata/ tingkat pendidikan yang dimiliki. Setiap pegawai yang telah

mengikuti diklat/ *course/ workshop/ e-learning* juga diwajibkan untuk melakukan *knowledge sharing* kepada seluruh pegawai. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi tuntutan guna memenuhi harapan masyarakat atas kualitas layanan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat.

C. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN BARAT

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran strategis dalam hal pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara. Adapun gambaran peran strategis tersebut adalah :

a. Melakukan pengelolaan kekayaan negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat memiliki peran untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara, dan difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari penatausahaan aset (*asset administration*) menjadi manajer aset (*asset manager*) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat selaku Pengelola Barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.

Sebagai asset manager menerapkan optimalisasi aset juga terhadap gedung Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan

menyewakan ruang pada sayap kiri gedung yang disewakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Sutoyo, serta telah dipersiapkannya ruang pada sayap kanan gedung untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

b. Melakukan penilaian kekayaan negara

Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penilaian kekayaan negara meliputi pelaksanaan penilaian, kegiatan standardisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian Barang Milik Negara tersebut antara lain akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara, penerbitan surat berharga oleh Negara dan pengurusan Piutang Negara.

c. Memberikan pelayanan piutang negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan Keuangan Negara dengan melakukan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.

Kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan cq DJKN diambil untuk meringankan Penanggung Utang yang terdampak ekonominya di masa pandemi virus Corona 19, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021. Kanwil DJKN Kalimantan Barat turut serta dalam mensosialisasikan dan membantu KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang agar mengoptimalkan kebijakan Crash Program. Data BKPN selesai sampai dengan bulan Desember 2021 dengan total nilai Rp 1.679.286.471,74 dan 263.916,57 USD, dengan rincian KPKNL Pontianak dengan 49 BKPN dengan total nilai Rp 1.489.757.742,74

dan 263.916,57 USD dan KPKNL Singkawang menyelesaikan 14 BKPN dengan nilai Rp 189.528.729,00.

Demikian pula dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, dimana diatur mengenai Piutang Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis. Dengan berlakunya PMK 163 Tahun 2020 ini menyebabkan tidak seluruh Kementerian/Lembaga dapat melakukan penyelesaian Piutang Negara sendiri. Salah satunya adalah Universitas Tanjungpura . Berdasarkan kesepakatan dengan Kanwil DJKN Kalimantan Barat dilakukan kerjasama pengurusan Piutang Negara pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor Per-01/WKN.11/2021 tentang Piutang Negara pada Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura yang ditandatangani bersama oleh Kepala Kanwil DJKN Kalbar dan Rektor Universitas Tanjungpura tanggal 4 Maret 2021.

d. Memberikan pelayanan lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana penjualan sebagaimana dimaksudkan oleh beberapa peraturan perundangan dan sebagai alternatif sarana transaksi penjualan aset kepada masyarakat.

Dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, lelang dicantumkan sebagai cara pelaksanaan (*execution*) putusan atau ketentuan perundangan tersebut. Lelang dipilih sebagai cara penjualan karena sifatnya yang transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya akta otentik berupa risalah lelang.

Peningkatan kualitas layanan, regulasi, pengawasan, penggalan potensi dan kemudahan pelaksanaannya terus menerus dilakukan dengan tujuan agar lelang menjadi sarana penjualan yang digunakan secara luas oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Tahun 2021 Indonesia masih diwarnai dengan merebaknya Covid 19, yang berdampak pada sektor ekonomi. Terkait hal tersebut, dengan kondisi sektor ekonomi Indonesia yang belum membaik, Kanwil DJKN Kalimantan

Barat turut mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mendukung program Direktorat Lelang yaitu KEDAI Lelang UMKM. Kanwil DJKN Kalimantan Barat turut mensosialisasikan dan memberikan edukasi lelang UMKM dengan melakukan penggalan potensi lelang antara lain kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten (Dekranasda) Kubu Raya, Dinas UMKM Provinsi Kalimantan Barat serta pelaku UMKM.

Demikian pula untuk meningkatkan potensi penerimaan Bea Lelang dan produktivitas lelang dilakukan penggalan potensi lelang Hak Tanggungan ke pihak perbankan baik Bank BUMN, Bank Daerah, BPR dan bank swasta BCA.

e. Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

Memberikan kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara yang diperoleh dari pemanfaatan Barang Milik Negara, hasil penjualan penghapusan Barang Milik Negara, Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang dari setiap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang diwilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami laporan ini, sistematika LAKIN ini kami susun dalam kerangka sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada tugas, fungsi, struktur organisasi serta peran strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021 beserta addendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada subbab ini disajikan hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021.

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Pada Renstra

Pada subbab ini diuraikan perbandingan antara IKU dan capaian Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Sasaran Strategis 2020-2024.

B. Realisasi Anggaran

B.1 Belanja Pegawai

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja pegawai.

B.2 Belanja Barang

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja barang.

B.3 Belanja Modal

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, terutama anggaran belanja modal.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Harapan kami, laporan kinerja ini dapat menjadi cerminan kinerja dan prestasi yang telah diraih Kanwil DJKN Kalimantan Barat sekaligus menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat pada tahun yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PENETAPAN KINERJA

Pelaksanaan tugas dan fungsi oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat berpedoman pada visi dan misi DJKN 2020-2024. Visi DJKN 2020-2024 adalah mengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: menjadi pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan untuk sebesar-Besar kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan DJKN adalah: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

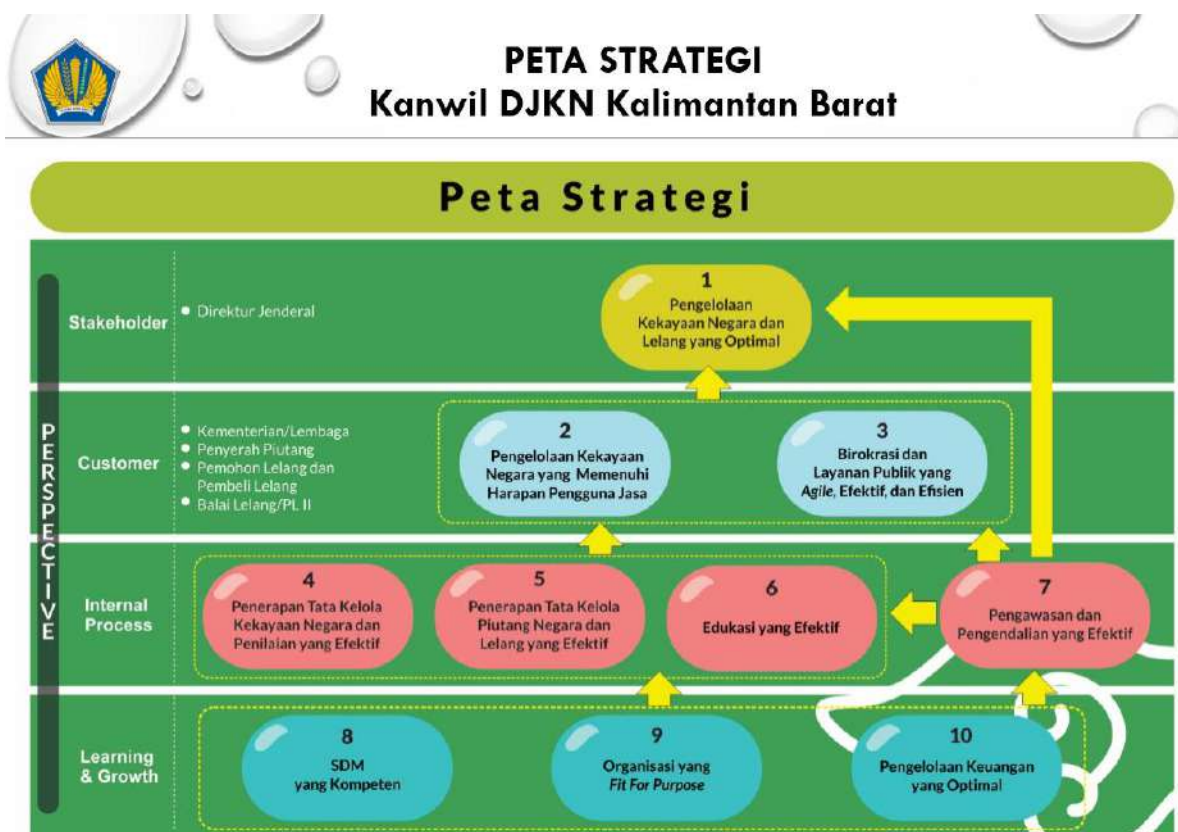
Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat perlu

membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada waktu satu tahun. Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, dokumen Penetapan/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 sesuai dengan peta strategis yang tertuang Kemenkeu Two terdiri dari 10 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun peta strategis Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Ikhtisar Sasaran Strategis



Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU dan keterkaitannya ada pada Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kepala Kantor Wilayah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Uraian IKU

Kode	URAIAN IKU	Target Tahun 2021
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal		
1a-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1c-CP	Presentase Penurunan nilai Outstanding Putang Negara (saldo PNDs s.d. 2017)	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-N	Indeks ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan lelang kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	83,67
2b-CP	Persentase Realisasasi Pokok Lelang	100%

Birokrasi dan Layanan Public Yang Agile, Efektif, dan Efisien		
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,29
Penetapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif		
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22%
Penetapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif		
5a-CP	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%
5b-CP	Presentase produktivitas lelang	35%
5c-CP	Presentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	92%
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
Edukasi yang efektif		
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	89
Pengawasan dan pengendalian yang efektif		
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
SDM yang kompeten		
8a-N	Presentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
Organisasi yang fit-for-purpose		
9a-N	Nilai Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	85
9b-N	Nilai hasil reuiu pengelolaan kinerja	75
Pengelolaan Keuangan yang optimal		
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%

Anggaran pada tahun 2021 beberapa kali mengalami revisi untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penghematan. Adapun rincian anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rincian Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	-	-
BELANJA BARANG	2.449.529.000	2.104.753.000	2.059.163.878	97,83	45.589.122
BELANJA MODAL	1.526.165.000	1.126.117.000	1.095.399.530	97,27	30.717.470
JUMLAH	3.975.694.000	3.230.870.000	3.154.563.408	97,55	76.306.592

Untuk menerjemahkan strategi kedalam suatu tindakan, sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, sejak awal 2008 Kementerian Keuangan telah menerapkan manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). BSC berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja agar tujuan organisasi tercapai dan terkelola secara efektif dan efisien. BSC dipilih sebagai sistem manajemen strategis dan pengukuran kinerja Kementerian Keuangan karena beberapa faktor, antara lain :

1. mampu menerjemahkan strategi organisasi dalam suatu tindakan;
2. memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi dengan memperhitungkan perspektif finansial dan non-finansial, serta lingkungan internal maupun eksternal organisasi dan keadaan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang;
3. memberikan umpan balik untuk peningkatan/perbaikan kinerja pada periode berjalan dan peningkatan/perbaikan kinerja di masa mendatang;
4. memiliki konsep sebab akibat dimana pencapaian kinerja diperoleh dari serangkaian proses dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan penyusunan strategi. BSC merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi

Peta Strategi Kemenkeu One DJKN Tahun 2021 menerapkan 4 perspektif yang saling berhubungan, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and*

growth perspective berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Empat perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU juga menganut prinsip SMART-C, yaitu *specific* (menyatakan sesuatu yang khas/unik), *measurable* (dapat diukur dengan jelas), *agreeable* (disepakati), *realistic* (dapat dicapai, namun menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *continuously improved* (dapat menyesuaikan perkembangan strategi organisasi).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat selama tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada

masyarakat secara luas. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa melaksanakan evaluasi internal melalui Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulan dan *weekly meeting* sebagai upaya monitoring dan memperkuat pengelolaan kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020 terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2020, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 109,29. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perspektif Capaian Kinerja

NO.	PERSPEKTIF	BOBOT PERSPEKTIF (%)	BOBOT CAPAIAN (%)
1	<i>Stakeholder</i>	40	41,22
2	<i>Internal proses</i>	30	33,62
3	<i>Learning & growth</i>	30	34,45
Nilai Kinerja Organisasi		100	109,29

Rincian perbandingan target dan realisasi dari 20 (dua puluh) IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, Realisasi IKU dan Indeks Tanpa Batas

No	Uraian IKU	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Indeks Tanpa Batas
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	55%	84,19%	153,07%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	116,26%	104,51%
3	Tingkat Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2016)	3%	8,25%	275,16%
4	Indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL	4,63	4,90	105,90%
5	Persentase hasil lelang (Pokok Lelang)	100%	84,48%	84,48%
6	Rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang	86	98,43	114,45%
7	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	104,58%	104,58%
8	Persentase efektivitas penyelesaian BKPN	100%	131,25%	131,25%
9	Persentase nilai kekayaan negara yang diutilisasi	100%	109,00%	109,00%
10	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	130,52%	130,52%
11	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	30%	0,00%	200,00%
12	Persentase produktivitas lelang	34%	39,47%	116,08%
13	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	90%	100%	111,11%

15	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	80%	94,32%	117,90%
16	Persentase Tindak Lanjut penyelesaian/perbaikan atas sisa aset objek penilaian kembali BMN	100%	99,09%	99,09%
17	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%
18	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	75,00	96,20	128,27%
19	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	70,00	92,53	132,19%
20	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	99,24%	104,46%

Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2020 adalah **109,29**. Mesti mengalami penurunan dari tahun 2019, namun Kanwil DJKN telah menunjukkan komitmen yang besar untuk mendukung pencapaian target dengan tantangan.

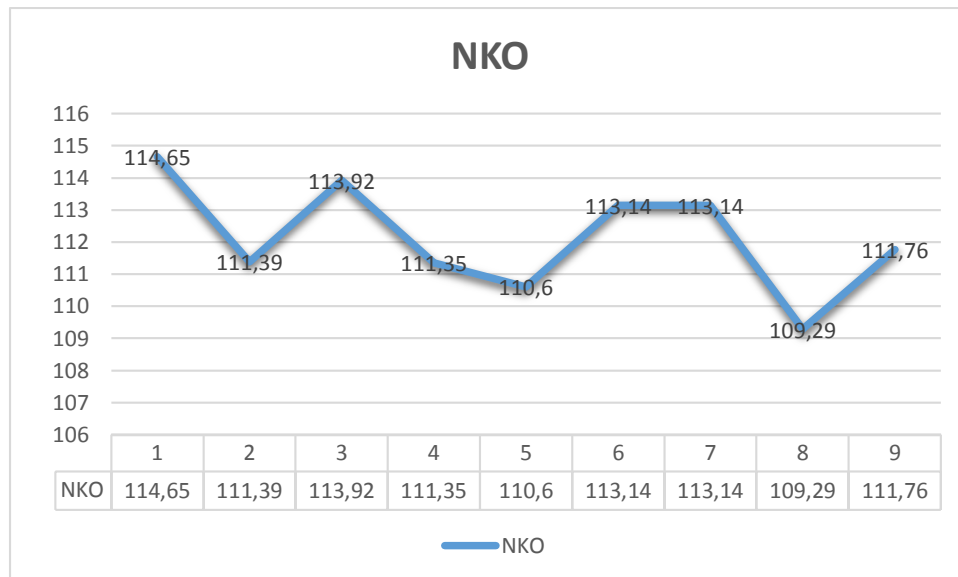
Rincian capaian dari masing-masing IKU sebagaimana data terlampir. Berikut adalah tabel data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat antara tahun 2012 sampai dengan 2020.

Tabel 3.3 Nilai NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2021

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah IKU	25	17	18	16	21	18	16	20	19
NKO	114,65	111,39	113,92	111,35	110,60	113,14	113,14	109,29	111,76

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Tabel 3.4 Perkembangan NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2013 sampai dengan 2021



A.1 Analisis Capaian

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021, diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021, sebagai berikut:

1. IKU 1a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Capaian IKU Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK di Tahun 2021 sebesar 82.06% dari target sebesar 62%, sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 132,34% atau dengan indeks maks 120%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang

Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga Kepala KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang serta Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

2. IKU 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Capaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara di Tahun 2021 sebesar Rp. 31.181.340.431,00 atau 84,31% dari target yaitu sebesar Rp 36.982.100.000,00.

Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Target tahun 2021 didasarkan pada pencapaian target tahun 2020 dimana

pada tahun 2020 capaiannya tinggi karena ada penerimaan dari lelang barang tegahan Bea Cukai.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2022 yaitu :

- a. Melakukan koordinasi dengan Satker untuk melakukan lelang BMN yang telah disetujui penghapusannya;
- b. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri untuk melakukan lelang barang rampasan

3. IKU 1c-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

Tingkat penurunan outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan Piutang Negara dan penagihan yang telah dilakukan. Penurunan outstanding Piutang Negara yang SP3N diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp86.559.442.044,00. Capaian penurunan nilai outstanding Piutang Negara pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh hasil sebesar Rp90.464.804.108,00 atau capaian sebesar 104,51%.

Keberhasilan pencapaian ini didukung dengan upaya-upaya antara lain efektifitas pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi yang baik dengan *stakeholder* terkait antara lain Penyerah Piutang BKPN dan lain-lain, intensifikasi penagihan dan melakukan optimalisasi pengurusan Piutang Negara, monitoring dan evaluasi yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan terhadap kinerja KPKNL. Tentunya pandemi covid sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan upaya penagihan kepada Debitur.

4. IKU 2a-N Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan menghasilkan output yang diinginkan oleh *stakeholder*, *customer* maupun pihak internal. Untuk mendukung upaya pemberian pelayanan yang berkualitas setiap waktu maka perlu adanya *Standard Operating Procedure* (SOP).

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Kantor Wilayah sebesar 98,93 dari target 83,67. Sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 118,24%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Semangat dan etos kerja yang tinggi para pegawai dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada *stakeholder*.
- b. Koordinasi yang baik antara kanwil DJKN dengan para *stakeholder*.

pemohon layanan sehingga apabila terdapat kekurangan data yang diperlukan dapat segera dipenuhi

- c. Sinergi yang baik antar pegawai di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian ketepatan waktu antara lain keterbatasan anggaran, terdapat beberapa obyek bersifat spesifik dengan sumber informasi yang terbatas, permohonan pengelolaan BMN berupa kerjasama pemanfaatan memerlukan analisis dengan tingkat kesulitan yang relatif tinggi dengan keterbatasan pengalaman dan kompetensi pegawai. Langkah-langkah yang telah dilakukan dengan menyelenggarakan *focus group discussion* (FGD) dan meminta arahan/petunjuk dari Kantor Pusat DJKN.

5. IKU 2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Kanwil DJKN Kalimantan Barat terkait pelayanan lelang memiliki fungsi pengawasan dan fungsi koordinasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial. Peningkatan pelaksanaan lelang yang potensial dilakukan melalui

penggalian potensi lelang, koordinasi masif dengan *stakeholder* di tingkat regional, peningkatan pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Balai Lelang yang aktif melaksanakan lelang di wilayah Kalimantan Barat.

Tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi Pokok Lelang yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Walaupun terjadi gangguan yang sangat besar dengan adanya wabah Corona, pelayanan lelang tetap dapat berjalan dengan berbagai penyesuaian yang tetap menjamin terpenuhinya SOP lelang namun memenuhi keselamatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan lelang. Namun demikian, mengingat kenaikan

target lelang yang tinggi dan selalu naik setiap tahunnya, pada tahun 2021. Capaian Pokok Lelang tahun 2021 sebesar Rp409.944.415.810,00 dari target sebesar Rp314.000.000.000,00 atau capaian sebesar 130,56%.

Penambahan informasi pelaksanaan lelang dengan menggunakan berbagai saluran informasi yang masif dan memiliki jangkauan yang kuat dan berpengaruh diupayakan untuk dimanfaatkan.

6. IKU 3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Target IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara pada Kantor Wilayah dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan kepada stakeholder melalui indeks kepuasan pengguna layanan yaitu sebesar 4,29 dari skala 5. Angka indeks diperoleh dengan melakukan survey menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada satker koordinator wilayah, yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.

Pada Tahun 2021 capain target sebesar 4,92 dari skala 5 atau sebesar 114,77% dari target. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi, sinergi dan *intimacy* yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan kepada satuan kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target IKU indeks kepuasan pengguna layanan Kanwil dan KPKNL adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang semakin baik yang diberikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat kepada para pengguna layanan;
- b. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan para *stakeholder*;
- c. Sinergi yang baik antar pegawai di bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat baik pada tingkat pelaksana maupun pejabat struktural;
- d. Dukungan Aplikasi SIMPELMAN (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Manajemen Aset Negara) dalam upaya monitoring dan evaluasi atas layanan yang diberikan.

7. IKU 4a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

Pada Tahun 2021, Kanwil DJKN Kalbar Bersama dengan Kanwil BPN Kalbar telah menyelesaikan sertifikasi 842 bidang tanah dari target 788 bidang (106,85%). Pada Tahun 2021 terdapat revisi target dari semula 1.200 bidang menjadi 788 bidang sebagai dampak adanya pandemi Covid 19. Pada Tahun 2021 Kanwil DJKN Kalimantan Barat akan melakukan sertifikasi terhadap 30 bidang tanah BMN di wilayah Kalimantan Barat.

Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kantor Pertanahan di wilayah Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja target sertifikasi.

Hal-hal yang mendukung capaian sertifikasi BMN antara lain:

- a. Peraturan Bersama antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dengan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24/PMK.06/2009 tentang

Pensertifikatan BMN berupa tanah dimana tindak lanjut dari Peraturan Bersama tersebut adalah kedua belah pihak membuat Berita Acara Kesepahaman Kerjasama Percepatan Pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah, masing-masing pihak baik DJKN maupun BPN mempunyai target yang harus dicapai;

- b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman satker target terhadap prosedur pensertifikatan BMN berupa tanah;
- c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan monitoring secara intensif sehingga penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan cepat ;
- d. Aplikasi SIMANTAP sangat mendukung satker, Kanwil, serta KPKNL dalam meng-*update* dan memproses pensertifikatan tanah;
- e. Pihak BPN dan unit kantor layanan yang sangat responsif dan solutif terhadap permohonan sertifikasi BMN.

8. IKU 4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) di Tahun 2022 sebesar 121,94% dari target sebesar 100%, sehingga capaian IKU dengan indeks tanpa batas sebesar 121,94% atau dengan indeks maks 120%. Pencapaian ini

tentu saja tidak lepas dari kerja keras, koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Negara pada Kanwil DJKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan juga Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan satuan kerja terkait.

9. IKU 4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 22% dengan realisasi sebesar 0%, dengan demikian capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian di tahun 2021 sebesar 200% dari target yang ditetapkan. IKU ini digunakan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian.

Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras dan sinergi yang dilakukan

oleh Bidang Penilaian pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat, seksi Penilaian pada KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dengan Bidang PKN/Dit. PKNSI, dan seksi PKN pada KPKNL.

Dari hasil evaluasi tersebut maka diketahui apakah dari sisi kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial kelayakan finansial dan kondisi teknis gedung/bangunan tersebut layak dipertahankan sesuai fungsinya saat ini

10. IKU 5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

IKU ini menggambarkan efektifitas pengurusan Piutang Negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas BKPN yang telah lama ditangani oleh PUPN. Penyelesaian dilakukan BKPN lunas, penarikan, dikembalikan, dan PSBDT. Target Kanwil DJKN Kalimantan Barat sebesar 259 BKPN. Capaian pada tahun 2021 sebesar 311 BKPN atau sebesar 120,08%.

Koordinasi dan sinergi antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL

Pontianak, KPKNL Singkawang dan Penyerah Piutang sangat berdampak pada capaian efektifitas penyelesaian BKPN. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan Piutang Negara antara lain:

- a. Potensi dan kualitas piutang yang rendah karena merupakan piutang lama dan tidak didukung barang jaminan.
- b. Wilayah kerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat yang sangat luas (14 kabupaten/kota) yang hanya dilayani oleh 2 KPKNL.

- c. Debitor sudah tidak diketahui keberadaannya dan alamat tempat usaha sudah tidak aktif lagi khususnya debitor penyerahan dari Kementerian Kehutanan dimana tempat usaha
- d. Adanya pandemi Covid-19 yang sangat mengganggu dilaksanakannya

- kegiatan-kegiatan bidang dalam pencapaian IKU;
- e. Kesulitan untuk mendapatkan profil perusahaan Debitor terutama koordinasi dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham

11. IKU 5b-CP Persentase Produktivitas Lelang

Target produktivitas lelang sebesar 35% untuk tahun 2021 dapat direalisasikan sebesar 37,66%. Terlampauinya target produktivitas lelang menjadi indikasi dinamika perekonomian di wilayah Kalimantan Barat yang mengalami pemulihan ekonomi dampak pandemik. Jaringan

kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak stakeholder yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Focus Group Discussion (FGD) dan intensitas penyebaran informasi tentang meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait pelayanan Lelang.

12. IKU Persentase Pelaksanaan Lelang e-Auction dan e-Conventional Auction

Pelaksanaan e auction, dalam rangka mendorong optimalisasi www.lelang.go.id, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang berkomitmen untuk melaksanakan lelang secara online, sehingga capaian e auction tahun 2021 sebesar 100%. Pelaksanaan lelang secara online sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah pandemi. Masyarakat dapat mengikuti lelang dari mana saja dan terjadi persaingan sempurna untuk mendapatkan hasil yang optimal.

E-Auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL dengan memanfaatkan teknologi internet. Pemanfaatan teknologi internet dalam pelaksanaan lelang ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. E-Auction dapat menjaring peserta dari seluruh pelosok (peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang) dan dapat meminimalkan intervensi antar peserta lelang, maupun antara KPKNL dengan peserta lelang. Persentase capaian target Implementasi e-Auction:

- a. Dari capaian IKU diatas dapat kita analisis, hal-hal yang mendukung tercapai target implementasi e-auction antara lain Aplikasi lelang online sudah user *friendly* dan mudah diakses dimana saja sepanjang ada jaringan internet serta E-auction terbukti sebagai mekanisme lelang yang dapat memberikan peningkatan harga yang signifikan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian terget dimaksud antara lain.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur lelang secara online. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada khususnya di KPKNL, pelaksanaan e-Auction membutuhkan dukungan daya listrik dan jaringan internet yang stabil tentunya perlu penambahan sarana seperti Genset dan juga jaringan internet di luar VPN dari Pusintek.
- c. Terkait dengan sarana dan prasarana yang ada khususnya di KPKNL, pelaksanaan e-Auction membutuhkan dukungan daya listrik dan jaringan internet yang stabil tentunya perlu penambahan

sarana seperti Genset dan juga jaringan internet di luar VPN dari Pusintek.

- d. Terkait sumber daya manusia, khususnya jumlah Pejabat Lelang Kelas I perlu penambahan kuantitas dan juga peningkatan kualitas terkait kompetensi dibidang IT untuk mendukung pelaksanaan e-Auction.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dengan pencapaian IKU persentase implementasi e-Auction diantara kegiatan sosialisasi kepada stakeholer lelang untuk mengenalkan lelang menggunakan tata cara penawaran melalui e-Auction, pembentukan e-Auction Corner di KPKNL, pemantauan pelaksanaan e-Auction yang rutin oleh Kanwil dan menyarankan kepada KPKNL agar sarana e-auction disiapkan pegawai yang mampu membimbing peserta lelang yang berminat mengikuti lelang e-Auction , penetapan e-Auction sebagai salah satu layanan unggulan Kementerian Keuangan yang didukung oleh semua pelaksana kebijakan lelang melalui e-Auction.

13. IKU 5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki target IKU ini yaitu sebesar 12,5% dengan realisasi sebesar 0%, dengan demikian capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian di tahun 2021 sebesar 200% dari target yang ditetapkan.

14. IKU 6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Selama periode 2021, Kanwil DJKN Kalimantan Barat beserta KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang telah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi terutama mengenai peraturan-peraturan baru terkait pengelolaan BMN. Dari hasil isian kuesioner yang diterima dari satker Kementerian/Lembaga diketahui dari Target IKU sebesar 81 adapun capaian pada Tahun 2021 sebesar 99,47 atau 117,86%

Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja di wilayah Kalimantan Barat. Proses bimbingan dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, *virtual meeting*, dan media lainnya.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU efektivitas edukasi dan komunikasi adalah :

- a. Intensifikasi pemanfaatan media sosial dan website dalam menyebarkan informasi

- b. Informasi yang dikomunikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para satker;
- c. Narasumber yang kompeten/SDM yang memadai;
- d. Antusiasme satker yang tinggi;
- e. Adanya komunikasi yang baik antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan stakeholder; serta;
- f. Fasilitas pendukung yang lengkap dan nyaman .

Kendala yang dihadapi dalam rangka edukasi dan komunikasi yaitu terbatasnya anggaran untuk lebih meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan dan *capacity building*. Langkah-langkah yang telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat *whatapps group* sebagai sarana diskusi, melakukan bimbingan melalui surat dan memberikan tanggapan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara langsung.

Selain itu, Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga membuat atribut-atribut yang memudahkan masyarakat memahami dan mengakses informasi misalnya

terkait lelang. Meningkatkan penyebaran informasi melalui media sosial dan mengajak *stakeholder* untuk mengkampanyekan layanan DJKN

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung misalnya lelang melalui internet.

15. IKU 7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset, dengan Target IKU sebesar 85%, adapun capaian pada Tahun 2021 sebesar 90,17% atau 106,09%. Pencapaian ini tentu saja tidak lepas dari koordinasi dan sinergi yang dilakukan oleh Bidang PKN Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang serta satuan kerja di wilayah Kalimantan Barat.

16. IKU 8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Definisi IKU Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai mengukur persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya.

Tujuan adanya IKU ini adalah untuk mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan penyelenggara.

Pada tahun 2021, persentase pengembangan pegawai mencapai 120% dan telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Hal yang mendukung pencapaian target ini

antara lain banyaknya pelaksanaan diklat yang ditawarkan oleh Kantor Pusat DJKN dan adanya aplikasi diklat yang memudahkan pegawai dalam menentukan diklat yang akan diikutinya.

Kendala yang dihadapi dimana pada tahun 2021, kondisi pandemi virus Corona sehingga beberapa diklat dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan dan dilaksanakan melalui online atau pelatihan jarak jauh. Namun demikian motivasi dan antusiasme pegawai tetap tinggi antusias dan semangat untuk dapat mengembangkan diri dengan mengikuti secara online di Kemenkeu Learning Center.

17. IKU 9a-N Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK/WBBM

Pada tahun 2021 Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengikuti pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Target yang ditetapkan didasarkan pada hasil penilaian dari Tim Penilai Tingkat Kementerian sebesar 75. Berdasarkan hasil penilaian yang disampaikan, Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh nilai 95,27 atau sebesar 127,03%.

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU efektivitas edukasi dan komunikasi adalah :

- a. Komitmen yang tinggi pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun ZI menuju WBK;
- b. Terwujudnya perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja;
- c. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung layanan antara lain aplikasi SIMPELMAN, SIMONA Google Calender, spreadsheet

weekly meeting dan E-Area Pelayanan Terpadu;

- d. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDM;
- e. Meningkatnya disiplin dan profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan;
- f. Sinergi, koordinasi dan intimacy yang dibangun dengan *stakeholder* sehingga menumbuhkan kepercayaan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan.

18. IKU 9b-N Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja

Target IKU review pengelolaan kinerja berbasis BSC sebesar 75 dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh nilai sebesar 91,65 atau sebesar 122,20%. IKU ini untuk mengetahui perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di Kanwil DJKN Kalimantan Barat serta sebagai upaya memberikan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa yang akan datang. Terdapat 4 komponen dalam pengelolaan kinerja yaitu :

- ✓ Perencanaan Kinerja
- ✓ Pelaksanaan/eksekusi kinerja

- ✓ Monitoring dan evaluasi kinerja
- ✓ Intensitas edukasi kinerja

Dengan hasil penilaian sebesar 91,65 menggambarkan pengelolaan kinerja pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat telah dilakukan dengan sangat baik. Namun demikian, di masa yang akan datang akan terus dikembangkan sehingga kualitas pengelolaan kinerja dapat lebih baik. Koordinasi dan sinergi antar bidang/bagian sangat penting dalam pengelolaan kinerja

19. IKU 10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi penyerapan atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi,

penyerapan anggaran atas pagu netto, penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, penyampaian LPJ, pengembalian SPM, retur DIPA, pagu minus dan dispensasi SPM.

Evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran

Indikator kinerja utama penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja di lingkungan Kementerian Keuangan. Unsur pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari komponen hasil dan komponen proses. Pada tahun 2021 ditetapkan target IKU sebesar 95,5% dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat berhasil memperoleh capaian sebesar 95,06% atau 99,54%.

Akar masalah tidak tercapainya target tahun 2021 dikarenakan realisasi/capaian penarikan dana tidak

sesuai dengan perencanaan (RPD) bulanan pada Q2 dan Q4.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2022 yaitu :

- a. Menyusun dan menghitung kembali Rencana Penarikan Dana dengan menyesuaikan rencana kerja terbaru dan ketersediaan DIPA;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan RPD;
- c. Mengajukan revisi halaman III DIPA.

B. REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran belanja Kanwil DJKN Kalimantan Barat mencapai 95,05%. Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa mengelola anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran belanja TA 2021 tersaji dalam tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
	AWAL	AKHIR			
BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0
BELANJA BARANG	2.104.753.000	2.104.753.000	2.059.163.878	97.83	45.589.122
BELANJA MODAL	1.126.117.000	1.126.117.000	1.095.399.530	97.27	30.717.470
JUMLAH	3.230.870.000	3.230.870.000	3.154.563.408	97.64	76.306.592

C. ACHIEVEMENT KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

C.1 Unit Kerja Berpredikat WBK

Pada tahun 2020, Kanwil DJKN Kalimantan Barat memperoleh predikat unit kerja berpredikat WBK. Penyerahan penghargaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui zoom meeting dan youtube pada tanggal 21 Desember 2020.



C.2 Juara Harapan 1 Lomba Kompetisi Inovasi Asset Manager (KOIN) DJKN Tahun 2021 Kategori Optimalisasi Aset pada Pengguna Barang



C.3 Juara Harapan 1 Lomba Kompetisi Inovasi Asset Manager (Koin) DJKN Tahun 2021 Kategori Optimalisasi Aset pada Pengelola Barang



C4 Peringkat Pertama Penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Satker SAKTI Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.



C.5 Penghargaan Masuk Top 10 Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) Tahun 2021

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat terpilih dalam Top 10 (sepuluh) inovasi dengan nilai tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan. Inovasi yang diajukan adalah “Layanan Online dengan Aplikasi SIMPELMAN”.

Mengikuti KIKK berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan ND Nomor 36/SJ/2021 tanggal 29 September 2021 hal Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan Tahun 2021. Dinyatakan lolos pada tahapan Seleksi Administrasi, Desk Evaluation, serta Penilaian Substansi inovasi. Dinyatakan lolos terpilih dalam Top 10 KIKK dengan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor 4406/KN.1/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penyampaian Undangan Presentasi dan Wawancara KIKK 2021.

C.6. Penghargaan Kontributor Artikel Paling Aktif Pada Website DJKN dan Media Sosial Instansi Vertikal DJKN Triwulan IV (Q4) Tahun 2021

Kanwil DJKN Kalimantan Barat senantiasa memberikan kontribusi artikel dan berita kegiatan pada website DJKN, media sosial dan media massa lokal Pontianak Post. Sebagai upaya mengembangkan literasi dan memberikan sumbangan ide, gagasan, serta solusi terkait berbagai hal.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Hukum dan Humas Nomor ND-65/KN.8/2022 tanggal 17 Januari 2022 hal Laporan Evaluasi Media Sosial Instansi Vertikal DJKN Triwulan IV (Q4) Tahun 2021, untuk akun media social facebook dan Instagram memperoleh nilai terbaik selama periode Triwulan IV Tahun 2021 dengan indeks penilaian 100.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Hukum dan Humas Nomor ND-40/KN.8/2022 tanggal 12 Januari 2022 hal Monitoring Pengelolaan Website Unit Kantor Vertikal DJKN Periode Triwulan IV Tahun 2021 dengan nilai 100 dan termasuk dalam tiga Kanwil bersama KPKNL di wilayah kerjanya yang mencapai nilai 100, yaitu Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dan Kanwil DJKN Kaltimara.

C.7 Penghargaan Yang Dicapai Oleh Pegawai Kanwil DJKN Kalimantan Barat

- Pegawai Inspiratif Tingkat Kementerian Keuangan Pada Masa Pandemi
Pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat atas nama Iwan Darma Setiawan menjadi pegawai inspiratif pada masa pandemi tingkat Kementerian Keuangan

Gambar 3.5 Pegawai Inspiratif Pada Masa Pandemi



D. INOVASI

D.1 Pengembangan Aplikasi

Kanwil DJKN Kalimantan Barat bekerja sama dengan Fakultas Teknis Universitas Tanjungpura telah mengembangkan aplikasi SIMPELMAN dalam rangka mendukung kualitas layanan yaitu :

- Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pelayanan Manajemen Aset Negara (SIMPELMAN)

Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Simpelman



Aplikasi yang dibangun untuk memonitoring pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang dan *stakeholders* dapat ikut memantau proses penyelesaian permohonan tersebut, serta dapat diajukan

secara online oleh *stakeholders* dan produk layanan dapat diterima secara digital oleh *stakeholders* melalui email. Tujuan pengembangan aplikasi:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 2) Menghilangkan KKN dalam pelayanan;
- 3) Meningkatkan percepatan layanan;
- 4) Meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pengajuan layanan;
- 5) Meningkatkan pengendalian internal atas layanan melalui monitoring progress layanan oleh pimpinan DJKN Kalbar maupun *stakeholders*;
- 6) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan.

Aplikasi SIMPELMAN sampai saat ini terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, antara lain telah diusulkan kepada Sekretariat DJKN, Direktorat PKNSI dan Direktorat Lelang untuk dapat diintegrasikan dengan lelang.go.id

- b. Sistem Informasi dan Monitoring Kinerja (SIMONA)
Aplikasi yang menyajikan informasi kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Barat.
- c. Google Callender
Aplikasi terkait jadwal kerja seluruh bidang pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.
- d. Spreadsheets Weekly Meeting
Aplikasi yang memuat laporan tindak lanjut hasil weekly meeting.
- e. Aplikasi E-APT
Aplikasi pengisian buku tamu dan kuesioner secara digital

D.2 Penyusunan Standar Operating Procedure Tentang Integrasi Proses Bisnis Layanan Pengelolaan BMN Dan Penilaian Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Kanwil DJKN Kalimantan Barat Menyusun SOP tersebut sebagai upaya meningkatkan pemberian pelayanan yang terbaik bagi *stakeholder* dengan memberikan kejelasan waktu penyelesaian.

D.3 Perjanjian Kerja Sama antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tentang Penyelesaian Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan Benda Sita Eksekusi serta Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah Kalimantan Barat

Tujuan dilakukan Perjanjian Kerjasama adalah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka penyelesaian benda sitaan, barang rampasan dan benda sita eksekusi serta penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memiliki peranan penting dalam pengelolaan aset tersebut sehingga perjanjian kerjasama ini akan lebih meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam pengelolaan aset serta mendukung setiap upaya pemerintah guna mewujudkan Indonesia maju.

D.4 Percepatan Standar Operating Procedure (SOP)

Kanwil DJKN Kalimantan Barat melakukan percepatan pelayanan kepada stakeholder dan layanan baru berupa :

- ✓ Penambahan SOP Pemberian Asistensi KSP kepada KPKNL (5 hari kerja menjadi 4 hari kerja)
- ✓ Pemberian Tanggapan Permohonan Informasi kepada Bidang PKN
- ✓ Percepatan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Lelang (7 hari kerja menjadi 3 hari kerja)
- ✓ Percepatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan Langsung (40 hari kerja menjadi 12 hari kerja)
- ✓ Percepatan Permohonan Keringanan Hutang (10 hari kerja menjadi 5 hari kerja)

D.5 Pelayanan Proaktif

Kanwil DJKN Kalimantan Barat secara proaktif melakukan pelayanan antara lain terkait Penyelesaian revaluasi BMN, Penyelesaian permasalahan tanah di Bandara Nanga Pinoh, Penyelesaian pemanfaatan BMN pada Satker Zidam, Penyelesaian aset eks PT. PPA dan BDL.

D.6 Publikasi

Publikasi senantiasa dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Barat melalui media sosial, website, media massa lokal Pontianak Post, acara Bincang 56 TVRI Stasiun Kalimantan Barat, RRI dan aktif menyampaikan opini yang diterbitkan melalui website DJKN dan harian Pontianak Post.

D.7 Buku Profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Disusunnya buku profil Kanwil DJKN Kalimantan Barat ditujukan untuk menjadi panduan bagi stakeholders agar lebih mengenal Kanwil DJKN Kalimantan Barat baik mengenai layanan yang diberikan serta jangka waktu penyelesaian sesuai SOP, tugas dan fungsinya, struktur organisasi, wilayah kerja, dan pejabat dan pegawai pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kanwil Wilayah DJKN Kalimantan Barat serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja sasaran didasari atas penilaian pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada awal tahun 2021 telah ditetapkan 10 Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 yang juga merupakan turunan dari IKU DJKN.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kanwil

DJKN Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas sebagai pengelola kekayaan negara, Piutang Negara, dan Lelang menghadapi tantangan di tahun 2021 dan hasil kinerja tahun 2021 tercermin dalam capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat tahun 2021 sebesar 111,76%.

Kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif di tengah wabah pandemi Covid-19, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, Piutang Negara, dan Lelang harus dijawab dengan inovasi, perbaikan proses bisnis dan peningkatan pelayanan. Namun demikian, Jajaran Kanwil DJKN Kalimantan senantiasa berusaha menjadikan setiap kendala atau tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat pada tahun 2021 secara umum dapat dikatakan baik dan dari target 19 IKU terdapat 17 IKU hijau dan 2 IKU kuning. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi capaian sasaran dan kinerja yang telah ditetapkan sehingga terdapat 2 IKU Kuning adalah:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Faktor utama yang menyebabkan tidak tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Target tahun 2021 didasarkan pada pencapaian target tahun 2020 dimana pada tahun 2020 capaiannya tinggi karena ada penerimaan dari lelang barang tegahan Bea Cukai.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2022 yaitu :

- a. Melakukan diskusi bersama para *stakeholders* untuk menyusun strategi mencapai IKU Tahun 2022;
- b. Terkait untuk pencapaian IKU;
 - 1) Target PNPB Pengelolaan BMN dan penyelesaian Piutang

Negara Tahun 2022, perlu direncanakan secara strategis agar target dapat terealisasi;

- 2) perlu dibuat rencana kerja secara terstruktur sistematis dan massive (TSM);
- 3) Jangka waktu penyelesaian permohonan pengelolaan BMN dari satker pada setiap unit harus sesuai dengan SOP link guna menjamin kepastian tindak lanjut permohonan satker.
- 4) Untuk mengamankan capaian target lelang perlu dilaksanakan koordinasi antara: KPKNL dengan satker, perbankan, Kejaksaan, Kepabeanan dan Cukai, dan masyarakat. Serta melakukan monev setiap bulan.

2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Akar masalah tidak tercapainya target tahun 2021 dikarenakan realisasi/capaian penarikan dana tidak sesuai dengan perencanaan (RPD) bulanan pada Q2 dan Q4.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengamankan tercapainya target tahun 2022 yaitu :

- a. Menyusun dan menghitung kembali Rencana Penarikan Dana dengan menyesuaikan rencana kerja terbaru dan ketersediaan DIPA;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan RPD;
- c. Mengajukan revisi halaman III DIPA.

3. Strategi Pengamanan Pencapaian Target Tahun 2022

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menghadapi perubahan lingkungan organisasi seiring dengan perkembangan teknologi yang

berpengaruh ke proses bisnis dan meningkatnya tuntutan masyarakat atas tata kelola pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang yang baik.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi tantangan ke depan sebagaimana kesepakatan yang tertuang dalam butir-butir Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2022 dengan mengusung tema “Dengan Semangat Presidensi G20, Kanwil DJKN Kalimantan Barat Siap Mendorong Optimalisasi Aset untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional”, berikut langkah-langkah dalam rangka mencapai rencana kerja dan target capaian kinerja Tahun 2022:

- 1) Guna mencapai target IKU Tahun 2022, perlu disusun strategi melalui diskusi bersama para stakeholders.
- 2) Terkait pencapaian IKU;
 - a. Target PNBPN Pengelolaan BMN dan penyelesaian Piutang Negara Tahun 2022, perlu direncanakan secara strategis agar target dapat terealisasi;
 - b. Penyelesaian sertipikasi Tahun 2022 dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi lebih awal antara satuan kerja pemilik tanah BMN dengan Kantor Pertanahan setempat.
 - c. Pelaksanaan perhitungan kesesuaian antara penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) pada satker perlu dibuat rencana kerja secara terstruktur, sistematis, dan massive (TSM);
 - d. Jangka waktu penyelesaian permohonan pengelolaan BMN dari satker pada setiap unit harus sesuai SOPlink guna menjamin kepastian tindak lanjut permohonan satker.
 - e. Dalam rangka mengamankan capaian target lelang perlu dilaksanakan koordinasi antara KPKNL dengan satker, perbankan, Kejaksaan, Kepabeanan dan Cukai, dan masyarakat, serta melaksanakan monev setiap bulan.
 - f. Strategi pencapaian target kinerja Tahun 2022;
 - i. Pencapaian NKO Tahun 2022 diprioritaskan pada perspektif yang memiliki nilai tinggi dan fokus pada capaian IKU yang *controllable*.
 - ii. Setiap IKU yang *controllable* diharapkan dapat dicapai dengan maksimal 120%.
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan/persetujuan pengelolaan BMN.
 - h. Terhadap permohonan BMN Idle, perlu dikoordinasikan secara khusus antara KPKNL dengan satker pemohon.
- 3) Terkait kompetisi-kompetisi yang diikuti:
 - a. Kanwil DJKN Kalbar serta jajaran KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang diharapkan mendapat predikat WBK/WBBM dengan menyusun rencana kerja strategis dan meningkatkan intimasi dengan para *stakeholders*.

- b. Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat hendaknya dapat meraih predikat Kantor Wilayah Terbaik (KWT) sehingga perlu membuat rencana kerja yang terstruktur.
 - c. Kegiatan Kedai lelang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kepada UMKM agar UMKM dapat menyiapkan produk yang layak dipasarkan.
 - d. Target Kompetisi Inovasi (KOIN) yaitu:
 - i. Tugu Khatulistiwa
 - ii. Aset Universitas Tanjungpura
- 4) Berubahnya struktur organisasi dengan hilangnya seksi pelayanan Penilaian dan Lelang dapat diganti dengan membentuk tim yang dipimpin oleh coordinator.
- 5) Dalam hal membutuhkan penambahan pegawai, unit yang membutuhkan harus memperhitungkan beban kerja yang dimiliki, serta memperhitungkan keahlian pegawai yang tersedia.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan komprehensif kepada seluruh pihak yang terkait atas capaian kinerja dan strategi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, sehingga dapat berguna dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja ini juga dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja ini harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat dapat meningkatkan kinerjanya dan semakin dirasakan perannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik.